

**PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II GOWA**



BOSOWA

Oleh

H A S A N

45 88 020 037

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Administrasi Negara

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1994

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini Kamis tanggal 07 bulan April tahun 1994

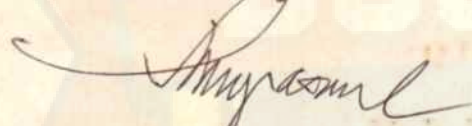
Skripsi dengan judul : "PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA"

Nama : H A S A N
Nomor Stb./Nirm. : 45 88 020 037 / 8811309919
Jurusan : Administrasi Negara

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 9 April 1994

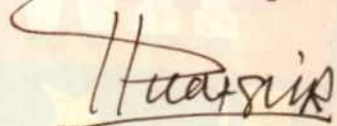
Menyetujui :

Pembimbing I



(Drs. S. Belopadang, MS)

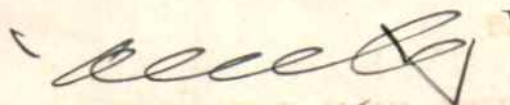
Pembimbing II



(Drs. M. Natsir Tompo)

Mengetahui :

D e k a n
FISIPOL Unirvesitas "45"



(Drs. Guntur Karnaeni)

Ketua Jurusan
Administrasi Negara
Universitas "45"



(Drs. H. Mohammad Thala)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Sabtu tanggal 9 April tahun 1994
Skripsi dengan judul : PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GOWA

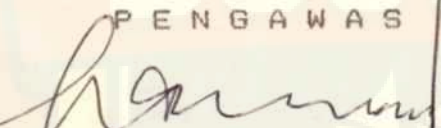
Nama : H A S A N

Nomor Stb./Nirm. : 45 88 020 037 / 8811309919

Jurusan : Administrasi Negara

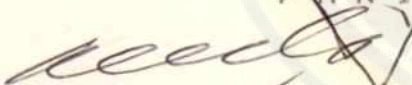
Telah di terima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Ilmu
Sosiologi program Strata Satu (S.1).

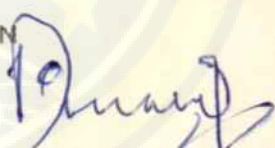
PENGAWAS UMUM


Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid


Prof. Drs. H. Sadly, AD, MPA.

PANITIA UJIAN


Drs. Guntur Karnaeni


Drs. Suparman Mekkah

TIM PENGUJI

1. Prof. Drs. H. Sadly Ad, MPA.

2. Drs. S. Belopadang, MS.

3. Dra. H. Aida Tallu Rahim, MS.

4. Drs. J. Daniel


.....)

(.....)

(.....)

.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan, sebagai suatu karya ilmiah guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

Pengelolaan retribusi terminal oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, keberhasilan pemungutannya ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu faktor pendukung adalah fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Fungsi perencanaan dalam pengelolaan merupakan langkah awal untuk menetapkan target dan tarif retribusi juga prosedur pelaksanaan pemungutan dan penyetoran dari hasil-hasil retribusi terminal. Pengorganisasian dilakukan untuk mengetahui tugas dan wewenang pegawai Dinas Pendapatan daerah Tingkat II Gowa, fungsi pelaksanaan adalah untuk mengetahui cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi, sedangkan pengawasan baik pengawasan langsung maupun yang tidak langsung bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di dalam pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Dan untuk kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Bedu dan Ibunda Siti Maryam yang telah memelihara, membesarkan dan membiayai kuliah penulis selama menempuh pendidikan.
2. Rektor dan segenap Pembantu Rektor, karena berupaya memimpin Universitas "45" sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan tenang
3. Dekan dan segenap Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena berupaya memimpin fakultas, sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan tenang.
4. Bapak Drs. S. Belopadang dan bapak Drs.M.Natsri Tompo, sebagai pembimbing penulis yang dengan rela meluangkan waktunya untuk memebri bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak persiapan penyusunan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi yang telah pengarahan dan pembinaan selama ini.
6. Bapak-bapak staf pengajar yang telah memindahkan ilmunya kepada penulis, sehingga nantinya diharapkan ilmu tersebut dapat menjadi bakal pengabdian penulis kepda agama dan bangsa.
7. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa beserta staf, Kepala Dinas LLAJR besret sataf dan

Kepala Bagian Sosial dan Politik Kabupaten Tingkat II Gowa yang telah memberikan data informasi yang menyangkut dengan pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Gowa.

8. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Kepala Bidang Penelitian), yang telah memberikan Izin Penelitian terhadap pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.
9. Adik Murmi yang selalu memberikan suasana yang tenang dan teman-temanku, Nasrullah, Firman, Muis, Te'ne, Abd. Anis dan Amir yang banyak membantu dalam berbagai kegiatan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa bentuk dan susunan materi bahan skripsi ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak apalagi jika dibandingkan dengan karya-karya ilmiah lainnya, untuk itulah penulis dengan lapang dada akan menerima saran-saran dan kritikan-kritikan dari semua pihak yang bersifat membangun. Penulis menyadari pula bahwa tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai balas jasa, kecuali KepadaNya sehingga penulis memohon agar apa yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai Amal Jariyah. Amin.

Ujung Pandang,

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR I S I	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
B A B I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	11
B A B II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Beberapa Pengertian	13
1. Pengertian Pengelolaan	13
2. Pengertian Retribusi	14
3. Pengertian Fungsi dan Manajemen	18
B. Penentuan Tarif retribusi	30
C. Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal	35
D. Aspek Retribusi dan Konsekwensi Administratif	36

E. Dasar Hukum Pengelolaan Retribusi Terminal	40
B A B III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa	43
B. Struktur Organisasi	46
C. Tugas-tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah	49
B A B IV : HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN	53
A. Perencanaan Target Penerimaan Retribusi Terminal	53
B. Tingkat Pengorganisasian Dalam Pemungutan Retribusi Terminal	69
C. Pelaksanaan	76
D. Pengawasan	79
E. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi	80
B A B V : KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	86

DAFTAR TABEL

No.Urt.	No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.	01.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989	56
2.	02.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990	57
3.	03.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991	58
4.	04.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992	59
5.	05.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993	60
6.	06.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994	61
7.	07.	Prosentase Perbandingan Target dengan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun Anggaran 1988/1989 s/d 1993/1994	64

No.Urt.	No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
8.	08.	Pendapat Aparat Tentang Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa	66
9.	09.	Tanggapan Respponden Terhadap Tata Cara Penyetoran Retribusi Terminal di Kabupaten DatiII Gowa	68
10.	10.	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pengorganisasian Dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Dati II Gowa	75

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

No.Urt.	No. Lampiran	Nama Lampiran	
1.	01.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa	88



ABSTRAK

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa sebagai daerah otonom dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, memerlukan sumber dana yang cukup, terutama dari sumber pendapatan tersebut adalah retribusi daerah, oleh karena itu retribusi daerah khususnya retribusi terminal memerlukan pengelolaan yang lebih baik.

Adapun tujuan penulis dalam membahas skripsi ini dengan judul "PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN GOWA" adalah : pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Gowa. Kedua untuk mengetahui bagaimana tata cara penyeteroran dan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Gowa dan yang ketiga hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan, dari retribusi terminal tersebut serta memecahkan masalah yang dihadapi didalam pemungutan retribusi terminal.

Sehubungan dengan judul penulis ketengahkan, maka dalam penyusunan teori tentang pengelolaan retribusi yaitu, bagaimana uapay-upaya yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan retribusi terminal.

Dalam rangka mendapatkan bahan dan data selain study kepustakaan, maka penulis mempergunaakn metode-metode penelitian lapangan dengan dasar Survei dan tipe

penelitian adalah Deskriptif yang bertujuan menguraikan dan menggambarkan obyek penelitian tentang data di lapangan.

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Observasi yaitu pengamatan secara langsung, merfadakan peninjauan kepada obyek-obyek atau lapangan penelitian untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksanaan pemungutn retribusi terminal.

Dari hasil penelitian terhadap pengelolaan retribusi terminal dari tahun anggaran 1988/1989 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994, targetnya Rp. 438.000.000,- dan realisasi penerimaan yang dicapai hanya Rp. 353.013.000 atau 80,60%. Ini berarti Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa cukup berperan dalam menambah keuangan daerah yang akan digunakan dalam membiayai urusan pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Setelah mengadakan penelitian, maka penulis mendapatkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut; bahwa dalam pengelolaan retribusi terminal di kabupaten Gowa, dari sektor retribusi belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Tingkat II Gowa. Hal ini disebabkan karena keadaan Terminal Sungguminasa Gowa sekarang ini, tidak sesuai dengan tata akan lingkungan Kota atau sudah

tidak memadai lagi, kurang disiplinnya petugas pemungut, kurangnya kesadaran para wajib retribusi terminal oleh Kepala Denda Tingkat II Gowa.





BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang digalakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan tersebut perlu adanya hubungan yang serasi antara Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Hubungan yang serasi tersebut diarahkan kepada penyelenggaraan otonomi daerah secara sektoral dan regional.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu sebagai konsekwensi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-gasri Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1979.

Lebih lanjut pula dalam Ketetapan MPR Nomor II tahun 1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah dinyatakan bahwa :

"Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan daerah diperlukan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah. Di samping itu dengan

memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan pengalihan dengan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan dengan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan meningkatnya aktifitas-aktifitas Pemerintah di bidang pembangunan, maka dengan sendirinya dana yang akan dibutuhkan meningkat pula. Dana yang dibutuhkan tersebut oleh pemerintah dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni dana yang berasal dari dalam negeri. Dana yang berasal dari dalam negeri ini adalah berupa pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya, yang sejenis dan sah menurut peraturan yang berlaku. Sedangkan pada Daerah Tingkat II dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, dapat bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

Pendapatan yang bersumber dari dalam daerah itu, sendiri berupa hasil-hasil perusahaan dan usaha-usaha daerah yang sah. Dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan hasil-hasil retribusi daerah yang direalisasikan melalui hasil-hasil retribusi daerah di samping pungutan-pungutan lainnya yang sah menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping perbaikan dan kemampuan aparat pemerintah di daerah terutama aparat sebagai pelaksana dalam rangka usaha peningkatan hasil retribusi daerah itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan penda-
gunaannya masing-masing. Selain itu dituntut pula peran serta masyarakat dalam usaha daerah khususnya kepada aparat pelaksana sebagai tenaga pengelola hasil retribusi daerah.

Seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, yang mengatur hal-hal yang menyangkut masalah keuangan daerah dinyatakan bahwa :

"Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup tetapi mengingat bahwa semua pembiayaan itu diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Di samping itu pula telah diatur pula dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang mengatur sumber keuangan daerah terdiri dari ;

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah,
 - b. Hasil retribusi daerah,
 - c. Hasil perusahaan daerah,
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah."

Bila dilihat pernyataan diatas, maka jelaslah di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang ada di negara kita yang merupakan daerah otonom dimana mempunyai pemerintahan, daerah dan mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah sendiri serta berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat e dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang menjelaskan tentang hakekat dari daerah otonom adalah:

"Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai Daerah Wilayah tertentu yang berhak, berwenang, berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari klasifikasi sumber-sumber keuangan daerah seperti yang terdapat pada pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 terlihat akan fungsi dan arti adanya retribusi daerah bagi Daerah Tingkat II Gowa. Dari sekian banyak sumber keuangan Daerah, maka sesuai dengan pasal 55 tersebut jelaslah bahwa salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang dapat digarap adalah retribusi daerah atau terminal. Sedangkan untuk pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Gowa.

Dengan sekian nampaklah sumber-sumber pendapatan tetapi perlu dipikirkan langkah-langkah selanjutnya



menuju kearah cara mengatasi pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut khususnya dalam bentuk pungutan. Daerah agar dapat membiayai daerahnya sebagai suatu daerah otonom.

Sehubungan dengan usaha untuk mengintensifkan pungutan retribusi daerah, maka untuk mencapai tujuan atau target diperlukan tindakan perencanaan. Tindakan perencanaan yang dimaksudkan sebagai rumusan kebijaksanaan serta pedoman bagi peningkatan pemasukan dan retribusi Daerah.

Tindakan perencanaan ini bertujuan untuk merangsang dan lebih meningkatkan potensi sumber keuangan daerah khususnya retribusi daerah, meningkatkan secara maksimal alokasi sumber-sumber keuangan Daerah serta koordinasi semua kegiatan dari berbagai tingkat pelaksanaan kemudian sistim pengelolaan administrasi yang mantap, sehingga hasil yang nantinya dicapai dari retribusi daerah dapat bermanfaat dan nyata bagi seluruh masyarakat sesuai dengan arah dan sasaran kebijaksanaan pemerintah daerah tingkat II Gowa.

B. Pembatasan dan Rumusan masalah

Skripsi ini merupakan suatu penelaahan mengenai pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang mempunyai hak dan wewenang

tertentu, mengurus dan untuk membiayai daerahnya serta pemerintahannya secara administratif.

Dengan demikian dalam pengelolaan retribusi daerah maka diperlukan upaya-upaya pemerintah daerah Tingkat II Gowa dalam membenahi sarana dan prasarana serta sistim yang digunakan dalam penarikan retribusi dan aparat pengelola yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam daerah tersebut.

Dalam usaha-usaha pengelolaan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa yang serba kompleks, maka dalam penulisan ini akan dipaparkan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa adalah sebagai berikut:

1. Uang Leges.
2. Uang Dispensasi Jalan
3. Uang Pangkalan
4. Uang Pemeriksaan pembantaian hewan
5. Uang Sempadan/IBM
6. Uang atas pemakaian tanah
7. Uang penguburan
8. Retribusi Terminal
9. Retribusi rumah sakit
10. Retribusi tempat rekreasi
11. Retribusi sampah
12. Retribusi hasil parkir

13. Retribusi KTP/KRT
14. Retribusi isin penetapan usaha
15. Retribusi pemberian nomor rumah
16. Retribusi pasar
17. Retribusi pelataran
18. Retribusi hewan
19. Retribusi batu bata
20. Retribusi persewahan gedung
21. Retribusi calon pengantin
22. Retribusi isin trayek

Melihat retribusi daerah di atas maka penulis hanya membatasi diri pada salah satu diantaranya dari jenis-jenis retribusi yaitu terminal yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa. Dalam pembahasan ini masalah pengelolaan retribusi terminal, maka penulis hanya membatasi pada permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan target penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa ?
2. Bagaimanakah tingkat pengorganisasian dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa.
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perencanaan target penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa.
- b. Untuk mengetahui tingkat pengorganisasian dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Dati II Gowa khususnya pendapatan yang berasal dari retribusi terminal.
- b. Dalam hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh siapa saja, sehubungan dengan upaya peningkatan pengelolaan retribusi terminal.
- c. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian studi pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

D. Metode Penelitian

1. Dasar dan Tipe Penelitian

a. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan dan penyelesaian skripsi ini adalah tipe penelitian "Deskriptif" suatu tipe penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi yaitu keseluruhan atau sejumlah obyek yang ada. Populasi yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Dati II Gowa adalah terdiri dari:

- Pejabat atau pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa = 22 orang
- Para wajib retribusi terminal = 625 orang
-
- Jumlah = 647 orang

b. Sampel, yaitu bagian dari jumlah populasi. Adapun teknik penarikan sampel adalah "Purposive Sampling" yaitu sampel dengan menentukan atau menunjuk langsung informan dari responden yang akan dipilih adalah sebagai berikut :

- Kepala Sub.Bag.Tata Usaha	= 1 orang
- Kepala Seksi retribusi	= 1 orang
- Kepala seksi perencanaan, pengawasan dan Litbang (peneliti dan pengembangan	= 2 orang
- Pelaksana administrasi	= 4 orang
- Pelaksana di lapangan	= 4 orang
- Para wajib retribusi terminal	=20 orang
<hr/>	
Jumlah	=32 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Studi Kepustakaan (Liberty Research) yaitu, dengan membaca dan mempelajari buku-buku dokumen-dokumen serta yang ada kaitannya dengan bahan materi skripsi ini.

b. Data Primer

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian langsung dilakukan pada obyek penelitian dengan mengunjungi Kantor Dinas Pendapatan Dati II Gowa dan lokasi terminal Baji Minasa Gowa adalah sebagai berikut :

- Observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang bersangkutan dan sambil mencatat data yang diperlukan.
- Wawancara (Interview) yaitu mengadakan tanya jawab dengan pejabat atau orang-orang yang biasa

memberikan informasi yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan yang dilakukan selanjutnya dalam skripsi ini, maka pembahasannya disusun secara sistematis dalam lima Bab sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan, Beberapa Pengertian, Penentuan Tarif Retribusi, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal, Dasar Hukum Pengelolaan Retribusi Terminal, dan Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Bab Ketiga Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang menjelaskan tentang, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, Struktur Organisasi, dan Tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah.

Bab Keempat yaitu Hasil Pengumpulan Data dan Pembahasan tentang, Perencanaan Target Retribusi Terminal, Tingkat Pengorganisasian Dalam Pemungutan Retribusi Terminal dan Faktor-faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Retribusi.

Bab Kelima yaitu merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan disini bertitik tolak pada pengertian yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta, dalam kamus Bahasa Indonesia yakni:

"Pengelolaan berarti pengurusan, penyelenggaraan."
(1982 : 1874).

Guna mendapatkan pengertian yang lebih luas perlu kita melihat aspek-aspek lain yang erat hubungannya dengan hal-hal penyelenggaraan yakni Administrasi yang dikemukakan oleh para ahli seperti ; Drs. Soekarno K menyatakan bahwa :

"Administarasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan."
(1986 : 13).

Sedangkan menurut pendapat Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan bahwa :

"Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu."
(1985 : 5).

Selanjutnya bahwa administrasi mencakupi organisasi dan manajemen, sedangkan administrasi itu

sendiri lebih luas volume kegiatannya dari organisasi dan manajemen. Demikian pula halnya bahwa administrasi merupakan penyelenggaraan dan orang merupakan yang menyelenggarakan kerja.

Jadi jelaslah bahwa pengelolaan sama dengan penyelenggaraan yang erat hubungannya dengan administrasi dan manajemen. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Adolfien Lucas, (1964 :45) menyatakan bahwa :

"... Pengelolaan keuangan daerah harus teratur dan cermat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah meliputi penyelenggaraan, pengurusan, pengendalian atas proses keuangan daerah. Proses keuangan daerah adalah proses kepemungutan sumber-sumber keuangan dan pengeluarannya dalam rangka membiayai aktifitas pemerintah."

Dengan demikian masalah pengelolaan keuangan terdapat unsur yang meliputi penyelenggaraan, pengurusan, pengendalian merupakan unsur yang paling berkaitan dengan kegiatan administrasi. Administrasi tidak hanya memberikan satu segi aspek kegiatan saja tetapi meluas yang merupakan proses pengendalian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.

2. Pengertian Retribusi

Ada beberapa batasan pengertian yang diberikan oleh para cendekiawan yang berhubungan dengan pengertian retribusi. Pendapat mereka pada umumnya berbeda dalam susunan kata-kata, namun pada hakekatnya intinya sama.



Apabila diperhatikan bunyi pasal Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 yang dimaksudkan dengan retribusi adalah:

"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena usaha yang diberikan oleh daerah."

Dari pengertian di atas, bila secara mendalam terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam memberikan pengertian retribusi yaitu; pungutan, pembayaran, jasa dan daerah. Pungutan disini maksudnya adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pembayaran adalah pungutan dilakukan kepada mereka sebagai pemakai jasa dan jasa disini dimaksudkan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah seperti dalam bentuk pelayanan dan sebagainya.

Di samping pengertian retribusi seperti di atas masih ada juga pengertian retribusi lain, dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 ditegaskan bahwa

"Retribusi adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah daerah sebagai pengganti (kerugian diensten = dinas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diensten = dinas-dinas itu."

Sedangkan menurut Wajong, (1957 : 7) dalam bukunya : Administrasi Keuangan Daerah, menyatakan

bahwa:

"Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau minyak daerah bagi yang berkepentingan atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung."

Sedangkan arti retribusi itu sendiri menurut Bohari, (1974 : 63) adalah sebagai berikut:

"Pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Disini nyata bahwa pembayaran pembangunan itu mendapat lagi jasa langsung, uang sekolah, uang pelabuhan, uang pasar, jasa pemerintah yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi."

Dari beberapa pengertian diatas terlihat ciri-ciri dari retribusi itu sendiri, adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah

Dengan demikian maka jelaslah bahwa retribusi merupakan pungutan Negara atau Daerah sebagai konsekwensi logis atas adanya pemakaian berupa jasa-jasa dari pekerjaan milik Negara atau Daerah bagi yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Bertolak dari batasan retribusi daerah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, diperoleh gambaran bahwa penyediaan fasilitas, tempat atau karena jasa yang diberikan oleh daerah kepada sekelompok masyarakat yang berkepentingan merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pungutan-pungutan retribusi. Sebab itulah maka Pemerintah Dati II Gowa telah berupaya untuk menggunakan segala sumber potensi daerah khususnya retribusi terminal.

Dalam pengelolaan retribusi terminal, dikenakan bagi setiap mobil atau kendaraan angkutan umum yang menggunakan fasilitas (terminal). Jadi pungutan retribusi terminal tidak ada unsur paksa hanya bersifat pidana, kalau tidak membayar maka orang yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk atau keluar dari terminal untuk mengambil barang atau penumpang, serta dilarang untuk meneruskan perjalanannya serta membongkar barang apabila mobil angkutan umum itu akan mengakhiri perjalanannya.

Setelah melihat beberapa pengertian retribusi maka selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian terminal. Rumusan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Gowa Nomor 6 Tahun 1980 pasal I terminal adalah :

"Terminal adlah tempat atau sarana angkutan darat yang digunakan dalam kegiatan angkutan barang dan penumpang tempat menunggu (stand

plaats) untuk mengambil dan menurunkan penumpang atau barang, pusat pembinaan tertib lalu lintas dan tertib angkutan atau tempat pemberangkatan dan pemberhentian mobil angkutan umum."

3. Pengertian Fungsi-fungsi Manajemen

1. Perencanaan

Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi problema-problema dimasa yang akan datang dan mereka memberi uraian bahwa perencanaan mengembangkan rancangan kegiatan hari ini untuk bertindak dimasa yang akan datang, perencanaan menjembatani jurang pemisah antara posisi kita sekarang dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan dapat menjawab tentang siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana tindakan-tindakan dimasa depan dapat dilaksanakan.

Perencanaan dilakukan secara matang, sebab tanpa perencanaan yang matang suatu sesuatu tidak mungkin dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pentingnya peranan, maka berikut ini Prof.Dr.S.P. Siagian mengemukakan bahwa :

"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan." (1981 : 108).

Sedangkan pendapat George Terry yang dikutip oleh Soewarno Handayani, mengatakan bahwa :

"Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan membuta dan menggunakan asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (future) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk terciptanya hasil yang dikehendaki." (1986 : 92).

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Mr.S. Prayudi Atmosudirdjo (1982 : 65) bahwa :

"Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari apa yang telah dijalankan didalam rangka mencapai suatu prapta (objektive) yang tertentu. Dimana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan disusun karena ada tujuan yang akan dicapai
2. Perencanaan pada dasarnya mengarah kemasa-masa yang akan datang.
3. Perencanaan disamping kegiatan, perencanaan didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada dimasa lalu sebagai patokan penyusunan rencana tersebut.
4. Perencanaan merupakan proses dari pemikiran secara matang tentang apa yang akan dikerjakan, dimana dilaksanakan siapa yang akan melaksanakan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan dan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses. Manusia merupakan unsur yang paling penting melalui pengorganisasian, maka manusia dapat bekerja dengan tugas-tugas yang telah ditentukan dan saling berhubungan.

Pengorganisasian terjadi karena ada pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan, dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tangan dan ketrampilan yang dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasikan bukan saja diselesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan, keterampilan dan pengetahuan.

Untuk lebih jelasnya pengertian Pengorganisasian maka penulis akan mengutip dua pendapat para ahli dibidang organisasi yaitu :

"Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang berdasarkan suatu perjanjian

untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan bersama yang tertentu." (1983 : 133).

Dari pengertian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnya organisasi merupakan kerjasama antara orang-orang yang terhimpun didalamnya yang mana untuk mencapai tujuan bersama pula. Dengan demikian bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi yaitu organisasi sebagai wadah yaitu merupakan tempat kerjasama dari orang-orang, dan dapat pula dilihat sebagai suatu proses yaitu kumpulan orang-orang yang saling berhubungan satu sama lainnya yang mana ada yang menjadi atasan dan bawahan.

Sedangkan pengertian yang dikemukakan oleh John F. Mee mengatakan bahwa :

"Pengorganisasi (organizing) adalah semua proses pengelompokan orang-orang, peralatan tugas wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara kesleuruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan." (1986 : 19).

Dengan demikian Pengertian pengorganisasian ada perbedaan dengan pengertian organisasi dalam arti sempit (wadah). Jadi pengorganisasian merupakan tugas utama kearah pencapaian tujuan perencanaan atau planning atau pengorganisasian itu mengikuti perencanaan.

Organisasi sebagai wadah atau tempat Bergeraknya manajemen, maka kedua arti organisasi dan manajemen

mempunyai hubungan, tetapi untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa pendapat Sarjana di bidang Management seperti : Koontz dan O'Donnel" , dalam bukunya yang berjudul "Principles Of Management" mengemukakan bahwa :

"Management ialah cara pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain." (1978 : 12)

Sedangkan menurut George Terry dalam bukunya yang "Principles Of Management" ia memberikan definisi sebagai berikut :

"Management adalah cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan tenaga orang lain." (1966 : 5).

Selain itu juga telah dikemukakan oleh John D. Milled, dalam bukunya yang berjudul "Management In the Public Service" mengatakan bahwa :

"Management adalah proses pemberian bimbingan atau pengarahan, serta pemberian kemudahan atau fasilitas-fasilitas terhadap orang yang melaksanakan tugas dalam organisasi formil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya." (1971 : 15).

Dengan menghayati definisi-definisi yang dikemukakan oleh Sarjana di atas, maka di dalam manajemen selalui ada orang-orang yang lebih dari satu dimana dalam hal ini terdiri dari 3 bahagian yaitu :

- a. Ada orang yang menetapkan tujuan (top manager)
- b. Ada orang yang membantu melaksanakan kebijaksanaan

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (middle manager).

c. Ada orang yang melaksanakan tugas (lower manager).

Ketiga komponen orang di atas, maka dapat dikelompokkan dalam; orang yang memimpin, dan orang yang dipimpin.

Jadi hubungan antara organisasi management itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Slamet Admosoedarano, SH. (1989 : 12) dalam bukunya yang berjudul; Pengantar Teori Administrasi, menyatakan bahwa :

"Hubungan antara organisasi dan management yaitu organisasi melihat administrasi dalam keadaan yang statis serta mencapai pola, sedangkan management melihat administrasi dalam keadaan yang dinamis serta gerak operasinya".

Dengan demikian jelas nampak, bahwa organisasi sebagai wadah atau tempat bagi management, sangat erat hubungannya dengan management, bahkan saling isi mengisi, pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Artinya mungkin suatu organisasi dianggap baik, tetapi management relatif tidak baik, akan mempengaruhi gerak atau mobilitas dari pada organisasi tadi. Demikian pula sebaliknya. Apabila managementnya relatif tidak baik, menyebabkan apa disebutkan dengan "Management" yaitu salah urus atau salah memimpin.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hubungan antara organisasi dan Management dapat diumpamakan sebagai hubungan antara badan jasmani kasar dengan rohani harus dalam tubuh seorang manusia. Artinya bila badan jasmani kasar kita sehat tetapi rohani kita sakit (sakit jiwa), maka hal itu akan turut mempengaruhi daya kemampuan kegiatan kita, demikian pula sebaliknya.

Jadi persis dari pada management, adalah kemampuan dari unsur pimpinan itu dalam mengemudikan atau mengantarkan bawahan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang akan dan telah ditentukan sebelumnya. Tugas mana tidak mudah sebagaimana dipikirkan orang, karena memerlukan teknik-teknik formil tertentu, pengalaman dan lain-lainnya. Dalam hubungan itu, maka ada suatu teknik bagaimana tujuan management itu dapat dicapai lewat orang lain, oleh John Milled telah memberikan pedoman dan definisinya, dengan menggunakan kata-kata Directing dan Fasiliting, ini mungkin penting dan diperlukan oleh tiap manager atau pimpinan mampu, khususnya bagi Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dapat memberikan pengarahan (directing) atau bimbingan dari oleh yang memimpin kepada yang dipimpin. Ini dapat dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut :



- a. Mengadakan atau mengikut sertakan bawahan dalam meningkatkan pengetahuan mereka seperti; penataran, kursus-kursus, diskusi-diskusi, seminar yang ada hubungannya dengan pekerjaan mereka sehari-hari.
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis, bila mereka pada suatu saat membuat kekeliruan atau kesalahan dalam tugasnya.

Dan juga memberikan perangsang-perangsang yang berupa kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak para pegawai atau karyawan seperti : gaji yang sesuai dengan pangkat atau tanggung jawab, diberikan tunjangan-tunjangan lainnay seperti pakaian dinas, rumah dinas, kendaraan dinas dan sebagainya, yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok pegawai Negeri Republik Indonesia, serta undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah yang kedua-duanya berlaku secara Universal merata bagi seluruh Wilayah Daerah Kekuasaan Republik Indonesia. Demikian struktur organiaasi pemerintahan di Daerah-daerah bersamaan. Demikian pula mengenai tata cara yang berlaku bagi kepegawaian Republik Indonesai seperti : Sistem penerimaan pegawai, penempatan pegawai, pengarahan, penggajian, cuti, pensiun dan sebagainya .

3. Pelaksanaan

Tahap ketiga dari fungsi manajemen yang akan

penulis bahas adalah tahap pelaksanaan yang merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan yang merupakan pelaksanaan yang baik apabila didasarkan atas suatu rencana yang pengorganisasian yang baik pula, dengan demikian tujuan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Actuating (mengarahkan) berarti tindak yang melaksanakan/mengusahakan agar semua anggota kelompok suatu atau berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi (George R. terry, 1970).

Pelaksanaan merupakan bagian penting daripada proses manajemen, berlainan dengan ketiga fungsi fundamental lainnya karena pelaksanaan berhubungan dengan orang-orang sebagai pelaksana.

Untuk itu agar personil atau pegawai itu dapat bekerja sebaik mungkin, maka mereka harus mempunyai kesempatan yang tepat, ditambah dengan bantuan potensi mereka, sehingga dalam pelaksanaan tugas harus memperhatikan antara lain :

1. Elemen manusia, didalam semua tindakan manajerial serta masalah-masalah
2. Mencari dan berusaha memenuhi kebutuhan pekerja.
3. Memperhatikan kepentingan daripada kelompok yang turut serta.

4. Pengawasan

Tahap terakhir dari fungsi manajemen yang penulis kemukakan dalam pembahasan judul Skripsi ini yaitu tahap pengawasan yang merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan, pengorganisasian yang baik pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula, sehingga tujuan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya maka penulis mengutip dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh : Prof. DR. S.P. Siagian adalah :

" Pengawasan ialah proses penagwasan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalans sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." (1986 : 135).

Sedangkan pengertian yang dikemukakan oleh : Sujanto, (1984 : 105) pengawasan adalah :

"Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak."

Selanjutnya pengertian pengawasan oleh : Mc. Farland mengemukakan bahwa :

"Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana

dan penentuan tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan." (1985 : 143).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan itu merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya, apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengawasan, yaitu agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan diperoleh antara out put dengan in put lebih besar in putnya.

Sasaran-sasaran lain dari pengawasan :

1. Agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan rencana semula
2. Agar supaya struktur serta hirarki, sesuai dengan pola-pola yang telah ditentukan atau digariskan dalam rancangan.
3. Agar penempatan orang-orang sesuai dengan pola-pola yang telah ditentukan atau digariskan dalam rencana.
3. Agar penempatan orang-orang sesuai dengan bidangnya
4. Penggunaan peralatan, dapat sesuai dengan prinsip-prinsip penghematan yang telah digariskan dalam

kebijaksanaan.

5. Pembagian tugas-tugas disesuaikan dengan rencana.
6. Sistem serta prosedur kerja dapat disesuaikan dengan rencana.
7. Untuk mencegah penyelewengan serta penyalahgunaan jabatan.

Ciri-ciri pokok pengawasan antara lain :

- a. Bersifat "fact finding" artinya dalam pelaksanaan fungsi tersebut harus menemukan fakta-fakta, tentang bagaimana tugas-tugas seharusnya dilaksanakan dalam organisasi.
- b. Bersifat "preventif" yaitu dengan melalui pengawasan harus dapat mencegah timbulnya penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan.

Teknik-teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Direct control (pengawasan langsung)
2. Indirect control (pengawasan tidak langsung)
 - ad. 1. Pengawasan yang bersifat langsung, ialah pengawasan oleh pimpinan yang langsung turun lapangan (Inspeksi langsung) atau observation on the spot. Pengawasan ini dapat dijalankan, apabila pimpinan mempunyai akan waktu yang banyak.
 - ad. 2. Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dapat dijalankan dengan cara ; menerima laporan dari bawahan baik secara tertulis

maupun lisan, tapi pengawasan semacam ini mempunyai kelemahan, antara lain bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, sedangkan hal-hal yang negatif biasanya disembunyikan.

Proses pengawasan akan jalan dengan sebaik-baiknya apa bila kedua tehnik pengawasan itu dijalankan sekaligus.

B. Penentuan Tarif Retribusi

Untuk menentukan suatu besarnya tarif retribusi, tidak sesulit seperti penentuan besarnya tarif pajak. Apabila menentukan besarnya tarif suatu pajak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri, namun untuk menetapkan besarnya tarif retribusi cukup dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun demikian penentuan tarif retribusi itu juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 (darurat) tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Disamping itu dalam menentukan besarnya tarif retribusi juga harus memperhatikan aspek ekonomi dan hukum. Olehnya itu, dasar pokok yang digunakan dalam penentuan akan tarif retribusi, adalah segi hukum dan segi ekonomi. Dasar hukum dipakai sebagai pedoman dalam menentukan besarnya tarif retribusi, agar tidak bertentangan dengan peraturan dan juga agar bersifat

formal. Dengan demikian tarif untuk retribusi tidak mudah dirubah oleh siapapun, kalau tidak ada dasar hukumnya yang kuat. Sedangkan dari segi ekonomi dimaksudkan agar penentuan tarif retribusi tidak terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan para wajib retribusi. Dengan penentuan tarif yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif yang saling berkaitan, dimana pada gilirannya akan menghambat kegiatan ekonomi daerah atau dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi bukan berarti bahwa penentuan tarif retribusi harus terlalu rendah, sehingga tidak bisa menutupi biaya-biaya dari pelayanan lain yang diberikan.

Karena dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak mungkin dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila tidak didukung oleh dana yang cukup. Sedangkan salah satu sumber dana pemerintah daerah adalah berasal dari pemungutan retribusi daerah dan pungutan-pungutan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Pertimbangan lain yang tidak boleh dilupakan dalam menentukan tarif retribusi adalah fungsi dari retribusi itu sendiri. Menurut Dr.C.Goode Hart dalam bukunya yang berjudul Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, dikatakan bahwa fungsi retribusi adalah :

1. Sebagai sumber pembiayaan pendapatan untuk penyediaan dari public goods.

2. Alat untuk mengalokasikan sumber daya, yaitu barang dan jasa.
3. Alat untuk efisiensi dan disiplin pemakaian barang-barang dan jasa-jasa yang mahal biayanya dan terbatas jumlahnya." (1972 : 47)

Dari fungsi retribusi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya tarif retribusi adalah biaya (Cost) yang dikeluarkan. Adajuga dalam penentuan tarif retribusi berada diatas biaya yang dikeluarkan, namun tidak jarang ditetapkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Penentuan tarif retribusi demikian itu tentu saja mempunyai dasar pertimbangan tertentu, dasar pertimbangan dari penentuan tarif retribusi yang berada diatas biaya yang dikeluarkan, karena:

1. Sifat pelayanannya adalah pemberian izin (lisensi).
2. Pelayanan yang diberikan itu dikehendaki agar tidak dipergunakan sebesar-besarnya atau Pemerintah Daerah ingin membatasi pemakaian pelayanan yang bersangkutan antara lain: Tempat-tempat parkir di pusat-pusat pertokoan.
3. Permintaan pelayana itu tinggi.

Sedangkan dasar pertimbangan untuk penentuan tarif retribusi yang berada dibawah biaya yang dikeluarkan karena,

1. Pelayanan yang diberikan adalah bersifat kepentingan umum (public utility).
2. Ingin mendorong masyarakat untuk memakai pelayanan tersebut ; misalnya, pendidikan, tempat-tempat

rekreasi dan rumah sakit.

3. Pemerintah menganggap bahwa pelayanan pokok untuk masyarakat misalnya perumahan untuk golongan rendah.

Dan pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan tarif retribusi yang langsung atas konsumen adalah :

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak fair untuk membebankan kepada pembayar-pembayar yang tidak mendapatkan pembebasan retribusi bagi supply air minum atau untuk pendidikan secara umum. Alasan ini tidak dapat dilakukan bila suatu jasa dibiayai melalui kekayaan dan ketersediaan atau ketidakterersediaan jasa-jasa tersebut tergambar dalam penilaian .
2. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat. Hal ini lagi-lagi sering menjadikan suatu alasan retribusi untuk penyediaan air minum dalam meteran atau resep dokter.
3. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan individu didalam negeri. Contohnya air minum, listrik, kantor pos, telepon pembuangan sampah

seluruhnya dipergunakan untuk secara meluas oleh industri. Hal ini mungkin dapat mengakibatkan pembebanan retribusi kepada seluruh konsumen atau hanya kepada sektor industri dan perdagangan.

4. Mungkin ada bermacam-macam variasi dalam konsumsi individu yang berkaitan untuk memilih daripada memerlukan. Ini dapat diambil sebagai contoh adalah tempat rekreasi.
5. Retribusi dapat menguji arah dan skala daripada permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan. Suatu kasus dapat dibuat hampir pada setiap bentuk pengeluaran pemerintah dan keinginan untuk membayar langsung bagi pelayanan-pelayanan tersebut adalah suatu pengujian yang penting bagi keinginan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat diketahui yang menjadi obyek dan subyek retribusi. Subyek retribusi, khususnya retribusi terminal adalah sarana pemungautan yang terdiri dari pos dan petugas-petugas pemungaut yang telah dikelompokkan sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Sedangkan yang menjadi obyek retribusi adalah kendaraan umum angkutan yang keluar masuk pada terminal dengan membayar TPR.



C. Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal

1. Operasi Pemungutan

- a. Petugas tiap hari melakukan pemungutan kemasing-masing wajib retribusi dengan menyerahkan lembar benda berharga sesuai dengan beban retribusi Non Prodikal yang menjadi kewajibannya.
- b. Petugas pemungut retribusi menerima uang hasil pemungutan dari wajib pajak retribusi yang belum membawa kembali sisa lembaran benda berharga yang belum laku dibonggolnya.
- c. Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil pemungutan dan bonggol benda berharga kekoordinator pemungut.

2. Laporan Pemungutan dan Penyetoran Uang

- a. Koordinator pemungut setiap hari menerima uang dari hasil pemungutan dan bonggol benda berharga, setelah menghitung uang hasil pungutan, lalu membuat tanda terima uang tiga lembar dan diserahkan kepetugas pemungutnya.
- b. Koordinator pemungut setiap hari membuat laporan pemungutan dan penyetoran lima lembar atas dasar tanda terima uang, koordinator pemungut dan uang hasil pemungutan.
- c. Koordinator pemungut menyerahkan laporan pemungutan dan penyetoran uang hasil pemungutan

kepada bendaharawan khusus penerima untuk ditanda tangani.

D. Aspek Retribusi dan Konsekwensi Administratif

Selain dari penentuan tarif retribusi, maka pemungutan retribusi dapat pula ditinjau dari berbagai aspek adalah :

1. Aspek kecukupan Hasil Pungutan

Pemungutan suatu retribusi yang perlu dipertimbangkan adalah perbandingan antara output dan inputnya. Input dimaksudkan adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk suatu pungutan sedangkan output adalah berupa hasil yang diperoleh atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut atau output dapat memberikan hasil yang relatif besar dari pada kebutuhan dana untuk membiayai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai biaya operasional dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Jadi aspek kecukupan hasil merupakan suatu penentuan pemungutan retribusi yang sangat ditentukan oleh besar kecilnya biaya pemungutan sebagai salah satu pertimbangan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan dari pungutan tersebut. Pemungutan dikatakan baik apabila operasionalnya

relatif kecil dan hasil yang diperolehnya jauh lebih besar.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi mempunyai dampak yang positif, perlu mendapat prioritas yang utama dalam pelaksanaannya karena dengan itu dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, asalkan pungutan itu tidak menghambat perkembangan ekonomi masyarakat atau produksi suatu barang.

Dengan aspek ekonomi ini sering terjadi kontradiksi antara suatu kebijaksanaan pemerintah daerah dipihak lain seperti penghapusan sebahagian retribusi hasil bumi dalam rangka meningkatkan dan mendorong ekspor non migas dipihak lain pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, apalagi kalau daerah yang bersangkutan memiliki mayoritas hasil pertanian.

3. Aspek Elastisitas

Meningkatkan laju perkembangan pembangunan, khususnya pembangunan didaerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk sarana maupun prasarana. Untuk menjangkau pelayanan tersebut diperlukan suatu dana yang cukup besar, jadi pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seyogyanya elastis terhadap kebutuhan pemerintah yang bersumber dari masyarakat. Elastisitas suatu

pungutan dapat diamati dengan melihat perkembangan hasil pungutan yang dicapai dari beberapa tahun terakhir lalu dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

4. Aspek Keadilan

Aspek keadilan suatu hal yang sangat penting dalam mempertimbangkan suatu pungutan karena beban untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, hendaknya dipikul secara adil oleh masyarakat sesuai dengan pendapatan dan kemampuannya untuk membayar.

Pungutan merupakan distribusi pendapatan sehingga masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatannya relatif besar hendaknya memberikan kontribusi yang besar pula terhadap masyarakat yang mempunyai pendapatan yang relatif rendah dapat menyumbangkan lebih kecil dari nilai pelayanan yang dinikmatinya.

5. Aspek Administrasi

Suatu pungutan retribusi aspek administrasi mempunyai peranan penting artinya dalam menghindari kebocoran dan penyelewengan bagi petugas pemungut dan para wajib retribusi. Bila biaya pungutannya lebih besar daripada hasil yang dicapai akan merumitkan proses administrasi. Selain merumitkan proses administrasi juga akan membutuhkan banyak

tenaga yang berkualifikasi tertentu untuk melaksanakannya.

Dari aspek-aspek retribusi yang penulis kemukakan diatas, peranan faktor administrasi juga menentukan kelancaran dan keberhasilan proses pemungutan retribusi karena dengan proses administrasi, setiap hasil pemungutan harus dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Oleh sebab itu proses pemungutan retribusi sejak awal hingga berbentuk setoran uanga kas daerah, harus dibukukan secara tertib dan pertanggungjawaban ini harus selalau dibuat baik diminta maupun tidak diminta, sehingga dapat dikenal adanya pertanggungjawabam secara insedentil dan pertanggungjawaban secara rutin. Pertanggung jawaban secara insedentil adalah pertanggung jawaban yang harus dibuat setiap saat, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sedangkan pertanggungjawaban secara rutin ialah pertanggungjawaban yang harus selalu dibuat secara berkala, biasanya dibat setiap bulan sekali dalam bentuk laporan bulanan. Dan pertanggung jawaban ini harus dibuat atau dilaporkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi.

Untuk pertanggungjawaban secara rutin biasanya dikoordinir oleh BKP Dinas Pendapatan Daerah dan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Kepala

Dipenda, dalam bentuk laporan bulanan, laporan bulanan ini dibuat selambat-lambatnya tanggal 10 dalam bulan berikutnya. Hal ini adalah merupakan konsekuensi administrasi dalam pengelolaan retribusi daerah. Laporan bulanan, biasanya tidak dibuat secara khusus untuk retribusi saja, tetapi juga bersama-sama dengan jenis-jenis pungutan lainnya.

E. Dasar Hukum Pengelolaan Retribusi Daerah atau Terminal

Dasar hukum pengelolaan retribusi daerah atau terminal ditetapkan atas dasar otonom daerah, dimana pemerintah pusat telah menyerahkan sebahagian pendapatan negara kepada daerah-daerah untuk mengelola retribusi daerahnya masing-masing.

Telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah dan undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dimana telah ditentukan bahwa semua pajak dan retribusi daerah harus diberlakukan apabila telah disetujui oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang. Dengan demikian setelah ditetapkan undang-undang tentang peraturan umum retribusi berarti daerah telah memiliki dasar hukum sebagai pengelola retribusi terminal di Kabupaten Dati II Gowa yang berstatus sebagai daerah otonom. Untuk lebih jelasnya

dasar hukum pelaksanaannya pemungutan retribusi daerah, khususnya retribusi terminal dengan sistim kupon tanda pembayaran retribusi di Kabupaten Dati II Gowa yakni sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 (Darurat) tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah/Terminal.
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pembentukan daerah Tingkat II se-Sulawesi Selatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan menteri Dalam Negeri Nomor KM 169/L/Phb.79 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal Angkutan Jalan Raya.
6. Surat Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.551 - 059 tanggal 4 Maret 1980 tentang terminal Penumpang Angkutan Umum non bis.
7. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.551 - 059 tanggal 26 agustus 1980 tentang Terminal Angkutan Penumpang dengan mobil bis.
8. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 291/V/1979, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Sulawesi Selatan. Inspeksi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam rangka Retribusi Terminal.

9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1980, tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil bis di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.
10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1976 tentang Terminal dan Retribusi Angkutan Darat serta Retribusi Kendaraan Bermotor, bis dan non bis Angkutan Penumpang (Antar Kota) dan non bis dalam kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang penyerahan sebahagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa

Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dibentuk berdasarkan Undang-undang No.29 tahun 1957 yaitu tentang pembentukan Daerah Tingkat II Gowa se-Sulawesi Selatan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini, maka secara optimis bahwa Kabupaten Dati II Gowa adalah merupakan salah satunya daerah otonomi yang setingkat dengan Daerah-daerah lainnya, yang ada di Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian Kabupaten Dati II Gowa berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerahnya sebagai daerah otonom.

Dinas Pendapatan Dati II Gowa di dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan Dinas lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerahnya selalu didukung oleh instansi-instansi pemerintah lainnya dan kesadaran-kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah atau retribusi daerah, yang telah dan ditentukan oleh pemerintah, Peraturan-peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Dati II Gowa, adapun jumlah pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas yang membawahi unsur pembantu pimpinan atau sub, bagian Tata Usaha.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang membawahi tiga kepala Urusan.
3. Unsur pelaksanaan yaitu Kepala Urusan Umum
4. Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan Kepegawaian
5. Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan Keuangan
6. Unsur pelaksana yaitu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan yang membawahi tiga Kepala Sub. Seksi
7. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. Seksi Pendaftaran
8. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. Seksi Pendataan
9. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. Seksi Dokumentasi dan Pengadaan Pendataan
10. Unsur pelaksana yaitu Kepala Seksi Penetapan yang membawahi tiga Kepala Sub. Seksi.
11. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub Seksi Perhitungan
12. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub Seksi Angsuran
13. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. Seksi Penerbitan dan Pengadaan Pendataan
14. Unsur pelaksana yaitu Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan yang membawahi tiga Kepala Sub. Seksi
15. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub Seksi Pembukuan Persediaan.
16. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub Seksi Pembukuan Persediaan.

17. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub Seksi Pelaporan
18. Unsur pelaksana yaitu Kepala Seksi Penagihan yang membawahi tiga Kepala Sub. Seksi
19. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. seksi Penagihan
20. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. Seksi Keberatan
21. Unsur pelaksana yaitu Kepala Sub. Seksi Pengadaan Sumber sumber lain, dan
22. Unsur pelaksana yaitu Kepala Unit Penyuluhan

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat dikatakan, bahwa dengan jumlah 22 pegawai yang demikian itu, maka Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang dirasakan masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik.

Dengan jumlah pegawai yang ada tersebut, dapat pula dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, menunjukkan pola organisasi yang sederhana, sehingga diutamakan melalui pendidikan dan latihan yaitu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pegawai agar dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi pada masa-masa yang sedang dan yang akan datang.



B. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi yang baik dan teratur untuk kelengkapan administrasi, biasanya terdapat struktur atau susunan organisasi. Karena adanya struktur organisasi, ini akan dapat dilihat dengan mudah susunan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dalam melaksanakan tugasnya sudah di lengkapi dengan Struktur Organisasi. Adapun dasar hukumnya yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23. tahun 1989, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 14. tahun 1991, tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa. Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Kepala Sub. Bag. Tata Usaha
3. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi dan Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas. (lihat Lampiran 10).

Organisasi Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Gowa adalah merupakan suatu organisasi yang mempunyai peranan dan fungsi yang cukup berat dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, olehnya itu struktur organisasi

perlu mendapat perhatian yang khusus agar struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dapat memberikan dukungan terhadap program pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Bila suatu organisasi didalam pencapaian tujuannya memerlukan beberapa anggota sebagai staf pelaksanaan tugas-tugas yang pekerjaannya berbeda, maka organisasi semacam itu mutlak memerlukan suatu struktur organisasi yang etartur dan sempurna yang dapat dijadikan penuntun terlaksananya tugas-tugas organisasi yang akan dialokasikan kepada masing-masing anggota organisasi yang bersangkutan.

Organisasi adalah merupakan suatu wadah (statis) untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, sebelumnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli di bidang organisasi dan management seperti : Dr. S.P. Siagian, MPA, dalam bukunya Filsafat Administrasi sebagai berikut :

"Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formil, terikat, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atas, dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan." (1970 : 18).

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh : G.R. Terry (1984 : 121) bahwa :

"Kegiatan pengorganisasian tidak pernah berakhir. Melihat sebuah organisasi sebagai jaringan kerja (Net Work) pusat-pusat komunikasi pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan usaha-usaha, sehingga terlihat bahwa pengorganisasian bersifat dinamis. Perubahan-perubahan pasti terjadi karena tidak berurusan dengan manusia."

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai organisasi, penulis mengutip pendapatnya : The Liang Gie (1962 : 12) memberikan batasan tentang struktur organisasi sebagai berikut:

"Struktur organisasi rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi yang memikul tiap-tiap pekerjaan itu,"

Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Drs. P.S. Rahim (1982 : 29) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi Negara mengatakan bahwa organisasi adalah :

"Tata hubungan dari pada orang-orang yang mengadakan usaha bersama yang memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab."

Dengan berpedoman kepada definisi-definisi yang dikemukakan para sarjana di atas, maka dapatlah

ditarik suatu kesimpulan bahwa organisasi mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Adanya unsur manusia yang lebih dari satu orang
2. Adanya unsur kerja sama dari orang-orang itu.
3. Adanya unsur tujuan (objektives) yang akan di capai
4. Tujuan yang akan dicapai, mengandung kepentingan bersama atau tujuan bersama.

Didalam unsur yang kedua, yaitu unsur kerja sama mengandung pengertian adanya pembagian tugas, sekaligus untuk memberi kesempatan perlunya koordinasi.

Jadi dapat dikatakan bahwa organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, adalah merupakan organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai fungsi. Dikatakan sebagai wadah (tools of managemtn) atau sebagai tempat bagi Bergeraknya management, sehingga dapat memberikan bentuk bagi Bergeraknya management. Sebagai wadah, maka organisasi mengandung pengertian statis. Sedangkan dikatakan, organisasi sebagai fungsi, ialah organisasi dalam pengertian dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberi kemungkinan bagi management untuk bergerak dalam batas-batas tertentu.

C. Tugas-Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Gowa mempunyai tugas-tugas pokok-pokok dalam melaksanakan, mencari

dan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah baik yang sudah digali ataupun belum sama sekali, guna untuk menutupi anggaran belanja rutin daerahnya.

Adapun tugas-tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
2. Sebagai pelaksana yang meliputi segala usaha dan kesetiaan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
3. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
4. Sebagai pengawas, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atau pelaksanaan tugas-tugas pokoknya, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selanjutnya penyelenggaraan tugas-tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa juga mempunyai tugas-tugas lain, yakni terdiri dari :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke Kas Daerah secara maksimal baik terhadap sumber-sumber pen-

dapatan yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengadakan penelitian dan pengaturan tata cara pemungutan pajak dan retribusi serta pungutan-pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak wewenang maupun pungutan dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah guna menciptakan dan atau mencoba mencari sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Sebagai pimpinan dan mengkoordinasi seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan, berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.
4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus, dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
5. Meneliti rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
6. Meneliti pertimbangan-pertimbangan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna mendapatkan/mengambil keputusan.

7. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar atau kecilnya pungutan-pungutan daerah yang beraneka ragam itu.
8. MengeloaI kebijaksanaan tentang pendoatan untuk bahan-bahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Menyusun rancangan pendapatan untuk bahan-bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran belanja rutin dan pembangunan dinas.
10. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan daerah.
11. Mempersiapkan materi rancangan pendapatan daerah dan menyusun segala kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa.

BAB IV

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Target Penerimaan Retribusi Terminal

Dalam hal ini akan diketahui pengelolaan retribusi terminal yang dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, dan juga penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa.

1. Kebijakan Penetapan target dan penetapan tarif Retribusi terminal

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, bahwa penetapan target retribusi dan tarif retribusi prosesnya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Pengusulan besarnya target dan tarif retribusi diajukan oleh pihak eksekutif dan selanjutnya dibahas bersama-sama pihak legeslatif.

Setelah mendapat persetujuan pihak legeslatif, maka ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gowa sebagai peraturan Daerah. Proses selanjutnya pengesahan oleh Gubernur Sebagai Kepala Daerah Tingkat I.

Adapun pihak eksekutif yang terlibat dalam penetapan target dan tarif retribusi Daerah Tingkat II Gowa adalah sebagai berikut :

- a. Dinas pendapatan Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pungutan-pungutan Daerah.
- b. Bagian Hukum dan ortala
- c. Bagian Perekonomian.
- d. Instansi yang terkait, antara lain ; Dinas pekerjaan Umum, Dinas LLAJR dan satuan kepolisian.

Pertimbangan utama yang dibutuhkan dalam penetapan target retribusi dan tarif retribusi daerah pada hakekatnya melihat keadaan, situasi dan kondisi serta kemampuan daerah itu sendiri, sehingga penetapan tersebut tidak menimbulkan kerugian secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan itu adalah :

- a. Mengevaluasi realiasi retribusi terminal yang diperoleh tahun lalu.
- b. Melihat kemampuan daerah itu sendiri
- c. Melakukan peninjauan dan pengontrolan secara administrasi lima tahun sekali.

Mengavaluasi realisasi penerimaan, melihat kemampuan daerah melakukan peninjauan dan pengontrolan adalah untuk melihat kemampuan daerah dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, merupakan alat ukur bagi pemerintah Daerah Tingkat II akan kemampuan daerahnya dalam mengelola potensi yang ada serta tugas-tugas dan kewajibannya.

Hal ini dapat dilihat dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sebab Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah adalah merupakan pencerminan dari segala sumber-sumber dan kemampuan pendapatan Daerah di satu pihak, dan dilain pihak merupakan pengeluaran daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran yang digunakan oleh daerah atau pemerintah Daerah Tingkat II Gowa adalah seiring dengan yang dijalankan oleh pemerintah pusat yaitu anggaran yang seimbang yang berarti bahwa antara pendapatan dan pengeluaran harus selalu seimbang untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dengan demikian dapat dilihat sampai sejauh mana dari usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pihak pemerintah, didalam mengelola segala sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan lain, yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis terlebih dahulu menyajikan data-data tentang target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan retribusi daerah, dari Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dari tahun anggaran 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 adalah sebagai berikut



Tabel 01

TARGET dari realisasi penerimaan retribusi daerah
Tahun Anggaran 1988/1989

Jenis retribusi daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Uang leges	7.500.000	6.222.250
Uang dispensasi jalan	5.000.000	2.874.500
Uang pangkalan	-	-
Uang pembantuan hewan	10.000.000	7.332.000
Uang sewa gedung	-	-
Uang sempada / IHB	90.000.000	77.390.300
Uang atas pemakaian Tanah	-	-
Uang penguburan	-	-
Retribusi terminal	52.000.000	53.915.000
Retribusi rumah sakit	75.000.000	71.993.501
Retribusi tempat rekreasi	3.000.000	3.730.000
Retribusi pasar	120.000.000	125.660.000
Retribusi hasil parkir	2.500.000	2.035.900
Retribusi KUP / KPL	20.000.000	8.165.700
Retribusi tempat usaha	6.000.000	4.030.000
Sumbangan rumah rumah	-	-
Retribusi sampah	1.500.000	2.091.150
Retribusi peralatan	-	-
Retribusi penguburan hewan	-	-
Retribusi batu bata	-	-
Jumlah	392.500.000	365.440.851

Tabel 02

Target dari realisasi penerimaan retribusi daerah
Tahun Anggaran 1989/1990

Jenis retribusi daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Uang leges	12.000.000	10.543.125
Uang dispensasi jalan	5.250.000	4.674.500
Uang pangkalan	-	-
Uang pembantaian hewan	15.000.000	8.182.000
Uang sewa gedung	-	-
Uang sempada	90.000.000	54.296.500
Uang atas pemakaian tanah	-	-
Uang penguburan	-	-
Retribusi terminal	60.000.000	61.375.000
Retribusi rumah sakit	89.336.000	98.551.397
Retribusi tempat rekreasi	5.000.000	5.551.000
Retribusi pasar	125.000.000	134.552.900
Retribusi hasil parkir	5.000.000	2.035.950
Retribusi Ktp / Krt	-	1.079.250
Izin tempat usaha	4.000.000	5.282.250
Pemberian nomor rumah	-	-
Retribusi sampah	2.500.000	2.087.000
Retribusi pelataran	-	-
Retribusi angkutan hewan	-	-
Retribusi batu bata	-	-
Jumlah	413.086.000	388.273.022

Sumber : DIPENDA DATI II GOWA

Tabel 03

Target dari realisasi penerimaan retribusi daerah
Tahun Anggaran 1990/1991

Jenis retribusi daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Uang leges	13.200.000	12.709.950
Uang dispensasi jalan	8.000.000	13.613.000
Uang pangkalan	1.000.000	25.000
Uang pembantaian hewan	7.500.000	6.220.000
Uang sewa gedung	-	-
Uang sempada / IMB	90.000.000	82.667.500
Uang atas pemakaian tanah	-	-
Uang penguburan	5.000.000	5.844.500
Retribusi terminal	66.000.000	69.520.000
Retribusi rumah sakit	102.500.000	98.085.455
Retribusi tempat rekreasi	7.500.000	7.188.500
Retribusi pasar	130.000.000	135.977.150
Retribusi hasil parkir	2.500.000	3.174.200
Retribusi Ktp / Krt	20.000.000	11.789.400
Izin tempat usaha	14.000.000	17.196.230
Pemberian nomor rumah	-	-
Retribusi sampah	3.000.000	3.202.500
Retribusi pelataran	-	-
Retribusi angkutan hewan	-	-
Retribusi batu bata	-	-
Jumlah	470.700.000	467.213.385

Sumber : DIPENDA DATI II GOWA

Tabel 04

Target dari realisasi penerimaan retribusi daerah
Tahun Anggaran 1991/1992

Jenis retribusi daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Uang leges	13.500.000	9.459.681
Uang dispensasi jalan	8.000.000	5.855.500
Uang pangkalan	5.000.000	268.950
Uang pembantaian hewan	8.000.000	6.799.000
Uang sewa gedung	-	-
Uang sempada / IMB	140.000.000	143.302.000
Uang atas pemakaian tanah	-	-
Uang penguburan	6.000.000	7.223.000
Retribusi terminal	75.000.000	65.625.800
Retribusi rumah sakit	111.000.000	111.185.262
Retribusi tempat rekreasi	8.000.000	5.600.000
Retribusi pasar	135.000.000	139.287.250
Retribusi hasil parkir	3.000.000	2.975.700
Retribusi Ktp / Krt	2.500.000	600.000
Izin tempat usaha	27.500.000	34.147.250
Pemberian nomor rumah	Up	-
Retribusi sampah	3.500.000	2.766.000
Retribusi pelataran	300.000	81.000
Retribusi angkutan hewan	4.000.000	3.975.000
Retribusi batu bata	-	-
J u m l a h	550.300.000	539.151.393

Sumber : DIPENDA DATI II GOWA

Tabel 05

Target dari realisasi penerimaan retribusi daerah
Tahun Anggaran 1992/1993

Jenis retribusi daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Uang leges	13.500.000	7.971.600
Uang dispensasi jalan	8.000.000	6.806.000
Uang pangkalan	5.000.000	411.250
Uang pembantaian hewan	10.000.000	5.598.000
Uang sewa gedung	-	-
Uang sempada / IMB	225.000.000	151.236.364
Uang atas pemakaian tanah	-	-
Uang penguburan	6.000.000	8.083.500
Retribusi terminal	85.000.000	74.987.200
Retribusi rumah sakit	130.000.000	113.775.286
Retribusi tempat rekreasi	8.000.000	5.800.000
Retribusi pasar	150.000.000	133.251.400
Retribusi hasil parkir	3.000.000	2.734.950
Retribusi Ktp / Krt	37.000.000	20.604.000
Izin tempat usaha	35.000.000	53.928.500
Pemberian nomor rumah	-	-
Retribusi sampah	5.000.000	2.913.400
Retribusi pelataran	1.500.000	1.623.400
Retribusi angkutan hewan	4.000.000	6.261.800
Retribusi batu bata	30.000.000	30.509.500
J u m l a h	758.000.000	626.496.150

Sumber : DIPENDA DATI II GOWA

Tabel 06

Target dari realisasi penerimaan retribusi daerah
Tahun Anggaran 1993/1994

Jenis retribusi daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Uang leges	15.000.000	3.299.400
Uang dispensasi jalan	8.000.000	4.658.500
Uang pangkalan	5.000.000	426.500
Uang pembantaian hewan	11.000.000	659.000
Uang sewa gedung	5.000.000	659.000
Uang sempada / IMB	225.000.000	81.466.657
Uang atas pemakaian tanah	40.000.000	4.287.710
Uang penguburan	8.000.000	2.261.000
Retribusi terminal	100.000.000	27.590.000
Retribusi rumah sakit	145.000.000	32.867.872
Retribusi tempat rekreasi	8.000.000	805.000
Retribusi pasar	165.000.000	47.846.900
Retribusi hasil parkir	3.000.000	863.650
Retribusi Ktp / Krt	40.000.000	-
Izin tempat usaha	40.000.000	83.704.750
Retribusi sampah	10.000.000	1.768.500
Retribusi pelataran	2.000.000	184.000
Retribusi angkutan hewan	4.500.000	700.500
Retribusi batu bata	80.000.000	15.728.000
Uang calon pengantin	5.000.000	-
Jumlah	919.500.000	309.317.439

Sumber : DIPENDA DATI II GOWA

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa. Walaupun pada realisasinya masih kecil dibandingkan dengan jumlah target yang ditentukan.

Dengan melihat data yang ada di atas, maka penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dari sektor retribusi untuk tahun anggaran 1988/1989 yang ditargetkan yaitu Rp. 392.500.000,- sedangkan realisasi yang dicapai hanya Rp. 365.400.851, atau sekitar 93,11 %, tahun anggaran 1989/1990 yang ditargetkan sejumlah Rp. 413.086.000,- realisasi 93,99 %, untuk tahun anggaran 1990/1991 target yang ditetapkan Rp. 470.700.000,- sedangkan realisasi yang dicapai sejumlah Rp. 467.213.385,- atau sekitar 99,26 %, tahun anggaran 1991/1992 target yang ditetapkan sejumlah Rp. 550.300.000,- realisasi yang dicapai hanya sejumlah 539.151.393, atau sekitar 97,97 %, tahun anggaran 1992/1993 ditargetkan sejumlah Rp. 758.000.000,- sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai hanya sejumlah Rp. 626.493.150,- atau sekitar 82,65 %, sedangkan di targetkan dalam tahun anggaran 1993/1994 sejumlah Rp. 919.500.000,- dengan realisasi yang dicapai sejumlah Rp. 309.317.493,- atau sekitar 33,64%

Dari data tersebut di atas terlihat penurunan persen pencapaian hasil penerimaan. Ini disebabkan

oleh karena ada kenaikan target pencapaian hasil. Dari total penerimaan hasil-hasil retribusi daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan hasil dari sektor pajak dan sumbangan atau sumber-sumber lainnya.

Hal lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, bahwa penerimaan dari sektor retribusi terminal tidak mengalami penurunan yang tajam ini dapat dibuktikan untuk 5 tahun anggaran retribusi terminal mencapai 80,60 % dari target yang ingin dicapai. Bahkan ada dalam tahun anggaran 1989/1990 melampaui target 102,29 % dan untuk tahun anggaran 1990/1991 juga melampaui target 105,33%

Untuk lebih jelasnya perbandingan target yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dengan realisasi yang dicapainya khususnya retribusi terminal adalah sebagai berikut :

Tabel 07

Prosentase Perbandingan Target Dengan Realisasi
Retribusi Terminal Tahun Anggaran
1988/1989 s/d 1993/1994

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase
1.	1988/1989	52.000.000	53.915.000	103,68
2.	1989/1990	60.000.000	61.375.000	102,29
3.	1990/1991	66.000.000	69.520.000	105,33
4.	1991/1992	75.000.000	65.625.000	87,50
5.	1992/1993	85.000.000	74.987.200	88,22
6.	1993/1994	100.000.000	27.590.000	27,59
Jumlah		438.000.000	353.013.000	80,60 %

Sumber Data : Hasil Perhitungan data sekunder

Target yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, seperti yang terlihat pada tabl 07 tersebut di atas memperlihatkan adanya penurunan target pencapaian hasil.

Sedangkan untuk penetapan tarif retribusi terminal secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang harus ada diketahui adalah sebagai berikut :

- Biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- Aspek hukum dan ekonomi
- Sifat pelayanan yang diberikan
- Hal-hal yang berkaitan dengan lokasi dan waktu.

Pertimbangan pokok dalam penetapan tarif retribusi adalah biaya yang dikeluarkan.

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. Biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian retribusi terminal misalnya; gaji pegawai biaya administrasi.
- b. Biaya pemeliharaan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memelihara terminal.
- c. Biaya pelunasan karcis (Tanda Pembayaran Retribusi).

Apabila dianalisa terhadap pembahasan di atas, maka penetapan tarif retribusi terminal di Kabupaten Gowa tidak bertentangan dengan dasar hukum pemungutan.

Penetapan tarif retribusi terminal untuk tahun anggaran 1989/1990 telah diadakan perubahan peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1991 Lembaran daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 1991 Seri B, Nomor 6 Tahun 1990, untuk terminal dan retribusi terminal Angkutan Penumpang, dimana tanda pembayaran penumpang retribusi (TPR) non bis yang dulunya Rp. 400,- dinaikkan menjadi Rp. 600,- dan untuk Bis yang dulunya Rp. 500,- dinaikkan menjadi Rp. 600,-. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena tuntutan situasi dan kondisi Daerah.



Untuk lebih jelasnya tentang penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 05

Tanggapan Responden Tentang Penerimaan
Retribusi Terminal di Kabupaten
Daerah Tingkat II Gowa

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Sangat Lancar	6	18,75
2.	Lancar	14	43,75
3.	Cukup Lancar	8	25,00
4.	Kurang Lancar	4	12,05
5.	Tidak Lancar	-	-
Jumlah		32	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulia, Tahun 1993

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Gowa telah mendapat tanggapan baik dari respondenn, dimana responden memberikan penilaiannya sangat lancar yaitu ada 6 orang responden atau 18,75 %. Selanjutnya responden yang mengatakan lancar ada 14 orang responden atau 43,75 %, yang mengatakan cukup lancar yaitu ada 8 orang responden atau 25,00 % serta yang mengatakan kurang lancar ada 4 orang responden atau

12,05 %, dan tidak ada responden yang mengatakan tidak lancar.

2. Prosedur Penerimaan Retribusi Terminal

Proses pemungutan retribusi terminal sejak awal hingga terbentuknya setoran ke Kas Daerah harus dibubuhkan secara tertib dan teratur. Adapun jenis buku dan formulir yang dipergunakan untuk mengadminis-
trasikan hasil dari pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk Buku :

- a. Registrasi Permohonan pelayanan
- b. Regustrasi Penetapan retribusi
- c. Penerimaan Jenis retribusi
- d. Persediaan barang Berharga
- e. Harian pembagian Barang Berharga
- f. Kas Harian Retribusi
- g. Perhitungan retribusi Barang Berharga
- h. Registrasi retribusi Bulanan atau Mingguan

Di samping itu masih terdapat model buku lain yang dipergunakan dalam membukukan hasil pemungutan retribusi terminal yaitu :

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Penerimaan Sejenis
- c. Tanda Bukti Penyetoran uang
- d. Tanda Bukti Penerimaan Yang

2. Berbentuk Formulir :

- a. Formulir Permintaan, Permohonan Jasa Pelayanan
- b. Laporan Bulanan
- c. Permintaan Barang Berharga
- d. Perhitungan penerimaan Barang Berharga

Petunjuk dari Mapenda di atas, juga telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa.

Untuk lebih jelasnya tentang tata cara penyeteroran retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 09

Tanggapan Responden Terhadap Tata Cara
Penyeteroran Retribusi Terminal di
Kabupaten Dati II Gowa

No. ; Jawaban Responden ; Frekwensi ; Prosentase (%)

1.	Sangat baik	8	25,00
2.	Baik	12	37,05
3.	Cukup baik	10	31,25
4.	Kurang baik	2	6,25
5.	Tidak baik	-	-
Jumlah		32	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1993.

Dari data tersebut pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tata cara penyeteroran retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa telah mendapat tanggapan serius dari responden, dimana responden memberikan penilaiannya sangat baik ada 8 orang atau 25,00 %, selanjutnya responden yang mengatakan baik ada 12 orang atau 37,05 % responden yang mengatakan cukup baik ada 10 orang atau 31,25 %, yang mengatakan kurang baik ada 2 orang atau 6, 25%, dan tidak ada responden yang mengatakan tidak baik.

B. Tingkat Pengorganisasian Dalam Pemungutan Retribusi Terminal.

Pada pembahasan terdahulu telah dikatakan bahwa didalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, adalah suatu struktur organisasi yang teratur dan sempurna yang dapat dijadikan penuntun terlaksananya akan tugas-tugas organisasi kepada masing-masing anggota organisasi.

Jadi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa adalah merupakan organisasi sebagai wadah atau sebagai tempat untuk bergerak manajemen atau tempat beroperasinya manajemen di sini mengandung pengertian statis dan dikatakan organisasi sebagai fungsi ialah organisasi dalam pengertian dinamis yaitu organisasi yang memberi kemungkinan bagi manajemen untuk bergerak di dalam batas-batas tertentu.

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa ialah organisasi formil yaitu organisasi yang strukturnya dinyatakan secara tegas telah direncanakan dan ditentukan secara resmi berdasarkan atas hukum yang resmi yang mempunyai azas-azas pokok dalam organisasi, ialah faktor-faktor yang sifatnya fundamental yang harus ada bagi sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu dapat berharga atau dapat bernilai. Adapun tanpa unsur suatu itu mungkin di ragukan eksistensinya. Dalam hubungan itu maka organisasi dapat bergerak dengan baik. Adapun unsur yang merupakan asa-azas pokok dalam suatu organisasi yaitu:

1. Azas kesatuan komando (asas unity command)
2. Asas ketetapan dalam pengawasan (asas span of control)
3. Asas pembahagian kerja secara homogen (asas defiations of work)
4. Asas pelimpahan kewenangan atau kekuasaan yang diikuti dengan pertanggung jawaban.
5. Asas penetapan orang-orang yang tepat pada tempatnya atau right man in the right place.

ad. 1. Asas ini mengandung pengertian bahwa, dalam setiap organisasi dimana setiap petugas harus mengenal atau mengikuti dan mengakui hanya satu pimpinan saja.

Sebab bila tidak demikian halnya, maka dapat

dipastikan bahwa petugas atau pegawai akan jadi bingung, dalam hal menerima perintah, utamanya dalam memberikan pertanggung jawab. Bila ternyata bahwa dalam suatu organisasi ada pimpinan yang lebih dari satu orang, maka seorang harus menjadi wakil atau Kepala bagian. Dengan demikian maka kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas atau menerima perintah dapat dihindari, seseorang wakil pimpinan dapat bertindak, apabila berhalangan pemimpinya dimana diikuti dengan pelimpahan kekuasaan dari pimpinan dan tanggung jawab tetap berada didalam tangan pimpinan.

ad. 2. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa, seorang pimpinan harus mengetahui secara tepat, seberapa jauh penagwasan itu dapat efektif kepada bawahannya. Ini didasarkan kepada pemikiran adanya batas kemampuan manusia, demikian pula soal pengalaman manusia yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini manusia pemimpin. Faktor yang membedakan kemampuan itu adalah :

- a. Latar belakang pendidikan
- b. Perbedaan latar belakang pengalaman
- c. Perbedaan di bidang intellegensia (kecakapan)
- d. Perbedaan dalam pandangan hidupnya.

ad. 3. Asas pembagian kerja secara homogen dalam organisasi, harus sedemikian rupa bagi semua petugas atau pegawai yang ada dalam lingkungan organisasi, sesuai dengan keahlian, pengalaman serta tingkat kedudukan yang di jabatnya. tetapi jangan lupa, bahwa pembagian tugas itu tetap dalam satu kesatuan (homogenitas). Ini agar tidak terjadi apa yang disebutkan dengan "crossing job" yaitu kesimpang siuran tugas. Dengan demikian dapat diharapkan tetap terjalannya hubungan kerja yang harmonis, antara semua eselon yang ada dalam suatu organisasi dan ketenangan kerja dapat diciptakan atau karena masing-masing orang bekerja dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

ad. 4. Asas pelimpahan wewenang, asas ini merupakan dasar hukum bertindak, bekerja, atau tidak bekerja atau hak untuk bertindak. Setiap pelimpahan wewenang, selalu diikuti dengan tanggung jawab (responsibility). Sebaliknya setiap ada aspek tanggung jawab itu menandakan adanya wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Adapun cara untuk melimpahkan wewenang itu ada dua yaitu :

a. cara full delegation, yaitu pelimpahan wewenang secara penuh. Cara ini dilaksanakan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a.1. Diyakini atau dipercaya bahwa orang yang akan menerima wewenang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang telah dibuktikan dengan perbuatannya.

a.2. Orang yang akan diberi wewenang itu, sanggup dan mau dengan rela melaksanakan wewenang itu.

a.3. Orang yang akan menerima swewenang itu sanggup memikul resiko dari wewenang itu.

b. Cara part delegation, yaitu cara pelimpahan yang bersifat setenga-setengah. Ini dijalankan dengan perhitungan, apabila syarat-syarat yang terdapat pada full delegation tidak diketemukan pada orang yang akan menerima delegasi yang dimaksud. Jadi part deletagions itu, seolah-olah diberikan dengan mengandung motifasi percobaan semata-mata.

ad.5. Asas the right man in the right place, yaitu asas penempatan orang yang tepat pada tempatnya. Asas ini memang sangat diperlukan, bial

sasrananya memang tersedia. Cara penempatan semacam ini, memang pada fase permulaan juga merupakan alat kontrol atau pengawasan pendahuli (for controll) sehingga dapat dijamin tidak akan terjadi apa yang dinamakan "in effectivitas" dan "in efisiensi". Sebaliknya bila pimpinan ragu-ragu menggunakan asas ini, maka cepat atau lambat mekanisme pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan keuntungan lain yang dapat diambil dari asas tersebut antara lainnya; Pimpinan tidak terlalu banyak mengeluarkan energi, biaya untuk mengembangkan tenaga ahli. Selain dari itu, maka cara itulah yang sekaligus akan memberikan nilai serta martabat "good manager" bagi tiap pimpinan yang selalu menggunakan atau memperhatikan prinsip dalam soal-soal penempatan pegawai.

Dari teori di atas, apabila dilihat penerapannya pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Gowa, khususnya tugas dan wewenang pegawai belum selesai dengan ciri-ciri asa pokok organisasi. Karena pada kenyataannya masih ada pegawai yang bertugas rangkap atau berfungsi ganda, kurangnya pegawai dan yang paling utama dalam tugas pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa masih adanya pola kekeluargaan, sehingga tidak jelas akan peranan dan



hirarkhi kewenangan.

Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pengorganisasian dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

Tanggapan responden Tentang Tingkat Pengorganisasi Dalam Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Dati II Gowa

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Prosentase (%)
1.	Sangat baik	10	31,25
2.	Baik	14	43,75
3.	Cukup baik	8	25,00
4.	Kurang baik	-	-
5.	Tidak baik	-	-
Jumlah		32	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penulis, Tahun 1993.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pengorganisasian dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Gowa dapat berjalan dengan baik, dimana responden telah memberikan penilaiannya yang sangat baik ada 10 orang responden atau 31,25 %, selanjutnya responden yang mengatakan baik ada 14 orang responden atau 43,75 %, serta responden yang

mengatakan cukup baik ada 8 orang atau 25,00 %, dan tidak ada responden yang mengatakan kurang baik dan tidak baik.

C. Pelaksanaan

Sistem pemungutan dan penyetoran retribusi terminal telah dibahas pada bab II C. Apabila dibandingkan dengan sistem pemungutan dan penyetoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi retribusi, bahwa pemungutan dan penyetoran retribusi terminal dilakukan dengan membentuk suatu tim kerja. Tim itu dipimpin oleh seorang ketua disebut sebagai koordinator Pelaksana.

Kalau melihat struktur organisasi Dipenda, pelaksanaan pemungutan berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), namun karena kurangnya pegawai dan terbatasnya dana sebagai biaya operasionalnya, maka Unit Pelaksana Tejnis Dinas tersbeut diganti dengan tim pelaksana pemungutan. Tim itu berjumlah 4 (empat) orang.

Dalam melaksanakan tugas pemungutan retribsui terminal Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, dibentuk oleh satuan Polri Gowa beserta Dinas LLAJR

cabang Gowa dan masing-masing bertugas sebagai pengamanan jika sewaktu-waktu ada keributan LLAJR menahan kendaraan yang dikenakan retribusi selanjutnya menyerahkan kupon tanda pembayaran retribusi terminal kepada sopir atau pemilik kendaraan angkutan umum.

Dalam pemungutan retribusi terminal, kendaraan angkutan umum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kendaraan angkutan umum non bis, seperti mikrolet untuk antar kota dan kendaraan angkutan umum bis untuk antar kota dan kendaraan angkutan umum bis untuk antar daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dilakukan satu kali sehari tidak dipungut setiap kali masuk, dengan tarif pembayaran retribusi untuk angkutan umum non bis Rp. 600 dan angkutan umum dengan bis Rp. 600.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dias LLAJR dan koordinator pemungutan retribusi terminal, bahwa untuk kapasitas kendaraan angkutan umum yang keluar masuk di terminal Baji Minasa Gowa adalah sebagai berikut :

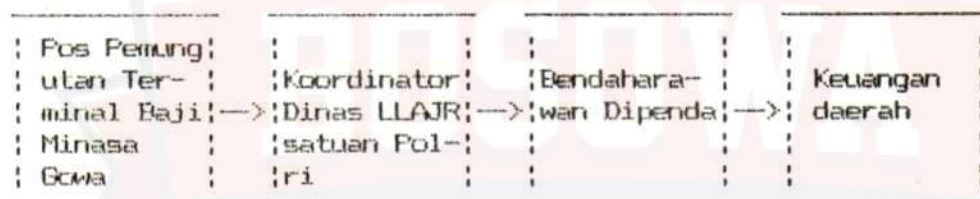
1. Untuk angkutan umum non bis rata-rata perharinya 570, buah.
2. Untuk angkutan umum dengan perharinya rata-rata 55 buah.

Setelah pemungutan retribusi terminal terampung, maka selanjutnya penyetoran hasil pemungutannya.

Penyetoran hasil pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh koordinator pemungut retribusi. Koordinator disini bertindak sebagai bendaharawan rutin.

Untuk penyetoran hasil keseluruhan pemungutan retribusi terminal koordinator pemungut atau bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa. Dan untuk jelasnya proses pemungutan dan penyetoran hasil retribusi etrminal, dapat dilihat adpa skema di bawah ini.

Proses Pemungutan Retribusi dan Penyetoran
Hasil Retribusi Terminal



: Waji Retribusi:
: Terminal :

Apabila di analisa skema di atas maka pelaksanaan waktu penyetoran hasil retribusi terminal sudah memenuhi ketentuan dalam Manual Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa yaitu penyetoran dilakukan setiap hari.

Hasil wawancara penulis dengan para pengemudi atau pemioikkendaraan angkutan umu, dikatanya masih

adanya petugas pemungut tidak atau kurang berlaku adil yaitu menerima pembayaran tanda pembayaran retribusi dibawah dari ketentuan yang sebenarnya. Dengan begitu petugas pemungut tersebut tidak memberikan karcis pembayaran retribusi terminal maka hasil pembayaran itu dipergunakan secara pribadi.

Mengenai pembagian trayek dalam terminal juga menjadi masalah bagi para wajib retribusi terminal, pembagian trayek dulunya ada khususnya untuk kendaraan angkutan umum bis, tapi sekarang ini sudah tidak diperhatikan dan ditinggalkan lagi sehingga sering menyebabkan para pengemudi atau kondektur mobil bis saling berebut penumpang.

D. Pengawasan

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Perencanaan dan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, pada dasarnya tehnik yang dipergunakan adalah tehnik pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung atau (indirect control). Pengawasan langsung dimaksudkan adalah aparat pengawasan atau Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan langsung ke tempat pelaksanaan pemungutan retribusi, bertujuan melihat secara langsung apakah pelaksanaan pemungutan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, apabial terjadi penyimpangan maka Kepala

Dinas segera dapat melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pemungutan itu. Sedangkan pengawasan tidak langsung dimaksudkan adalah aparat pengawasan atau Kepala Dinas melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk. Laporan tersebut berupa hasil pemungutan retribusi dengan pertimbangan benda berharga atau karcis yang dikeluarkan.

Jika dilihat teknik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, didalam mengelola retribusi terminal sudah tidak memungkinkan akan terjadinya penyimpangan. Namun kenyataannya di lapangan masih terdapatnya masalah-masalah yang ditemui, seperti adanya wajib retribusi yang lolos dari pembayaran TPR; dengan berbagai alasan seperti belum mendapatkan penumpang dan pembayarannya nanti setelah mengantar penumpang. Disini petugas pemungut retribusi terminal dituntut untuk berlaku konsisten terhadap tugas yang telah diberikan.

E. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi Terminal dan Penanggulangannya.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dalam mengelola retribusi terminal, adalah sebagai berikut :

1. Hambatan utama bagi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, adalah kurangnya pegawai.
2. Pada penetapan target dan tarif retribusi terminal, pihak eksekutif kurang memperoleh data atau informasi yang dapat memperkuat usulan dalam penetapan target dan tarif retribusi kepada Pemerintah Daerah.
3. Tugas dan wewenang pegawai belum tercipta secara jelas dan tegas seperti yang tertuang dalam struktur organisasi.
4. Kurang ketatnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa.

Penanggulangannya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dalam hambatan-hambatan di atas adalah:

1. Menggunakan tenaga sukarela untuk bertugas dan memungut retribusi terminal dengan insentif 10% dari TPR yang dipungut.
2. Membuat sistem pembukuan yang baik dan teratur, utamanya kepada petuags lapangan, sehingga dapat diperoleh data atau informasi yang akurat.
3. Memberi bimbingan kepada pegawai untuk dapat untuk dapat membedakan waktu dinas dan waktu di luar dinas. Sehingga akan jelas fungsi dan peranan dari masing-masing pegawai.

4. Lebih mengintensifkan pengawasan langsung, dengan cara mengecek langsung tanda pembayaran retribusi (TPR).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dalam menjalankan roda pembangunan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, telah berusaha untuk menggali sumber-sumber keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah di dalam pengelolaan retribusi terminal. Dimana responden telah memberikan tanggapan yang baik yaitu mengatakan lancar ada 14 orang responden atau 43,75 % dari 32 responden yang terpilih. Ia mengatakan tanggapannya lancar dalam arti penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.
2. Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Gowa adalah organisasi formil yaitu organisasi yang strukturnya dinyatakan secara tegas dan ditentukan secara resmi berdasarkan atas hukum, dalam pengelolaan retribusi terminal, dengan demikian secara jelas dapat dibuktikan dengan adanya pengorganisasian dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Gowa dan mendapat tanggapan baik dari responden yang terpilih 32 orang dan memberikan tanggapan baik ada 14 orang responden atau 43,75 %.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui penulis dalam pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa adalah sebagai berikut :
- a. Kurang disiplinnya para petugas pemungut retribusi terminal.
 - b. Kurang intensitasnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa.
 - c. Dituntut kesadaran para wajib retribusi terminal untuk melaksanakan kewajibannya, sebagai imbalan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah (terminal).
 - d. Kurangnya pegawai dan terbatasnya biaya operasionalnya.

B. Saran-saran

Setelah membuat kesimpulan yang berkenaan dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab-bab dan sub bab terdahulu maka berikut ini penulis akan memberikan buah pikiran sebagai jalan keluar untuk meningkatkan pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Mendidik dan melatih serta memberi perangsangan yang cukup kepada para petugas pemungut di lapangan.
2. Perlu ditingkatkan lagi fungsi pengawasan, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung secara

inspeksi, mendadak dan perlu diperbanyak dibandingkan jika hanya sekedar menerima dan memeriksa laporan-laporan yang masuk.

3. Perlu adanya petugas khusus yang mengawasi kendaraan angkutan umum yang tidak mematuhi atau tidak membayar karcis atau kupon tanda pembayaran retribusi terminal.
4. Sebagai pengusaha, angkutan dan pengemudi angkutan umum, agar senantiasa tidak melalaikan kewajibannya dalam membayar retribusi terminal. Dalam hal ini perlu ditumbuhkan kesadaran dengan memberikan penerangan tentang pentingnya pembayaran retribusi terminal, sebagai Pendapatan Asli Daerah dan hubungannya dengan fasilitas yang telah mereka pergunakan.

Dari saran-saran yang penulis kemukakan itu bukanlah mutlak akan mendatangkan perubahan jika diterapkan, tetapi setidaknya-tidaknya akan berpengaruh terhadap usaha peningkatan dalam pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Gowa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Atmosudirdjo, Prayudi, Prof.,Dr.,Mr.S. 1982. Administrasi dan Manajemend,CV. Rajawali,Jakarta
- Bohari, 1974. Administrasi Keuangan Daerah, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Davey, K.J., 1988. Pembiayaan Pembangunan Daerah, Penerbit, Universitas Indonesia Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 1986. Human Relations dan Public Relations Dalam Manajemen.
- Goedhard. 1972. Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Jakarta.
- handayaningrat, Soewarno. 1986. Pengantar Study Ilmu Adminsitrasi dan Manajemement, Gunung Agung, Jakarta.
- Kotta, A. Rahman, SU.,Drs. 1989. Teori Organisasi dan manajemen, Diktat Kuliah apda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
- Lucas, Adolfien. 1964. Menyelusuri Hubungan Pusat dan Daerah. Diktat Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
- Moekojat. 1986. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Remaja Karya Bandung.
- Siagian, S.P. 1983. Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sujanto, 1980. Otonomi daerah Yang Nyata dan Pertanggungjawaban, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedargo, R. 1964. Pajak-pajak daerah dan Retribusi Daerah. NV. Eresco, Bandung.
- Soejito, Irawan. 1984. Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bina Aksara, Jakarta.
- Iaho, Josef Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tjokroamidjojo. Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta

B. Dokumen-dokumen

- Bagian Hukum dan Organisasi tata laksana Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Himpunan Peraturan Daerah.
- Direktorat Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, Himpunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se-Sulawesi Selatan.

